

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan keuntungan tersendiri baginya. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis menjadikannya peluang besar untuk mengembangkan perekonomiannya. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia (Putri A. S., 2022). Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya merupakan lautan dan kaya akan sumber daya alam laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia 7,81 juta km², terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Garis pantai seluas 95.181 km² dan terletak pada posisi yang sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia, serta samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, lingkungan, pertahanan, dan keamanan (Junef, 2019).

Dengan luas wilayahnya tersebut, Indonesia bisa dibilang sebagai negara maritim yang memiliki Kawasan teritorial laut yang cukup luas. Pengertian dari negara maritim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Maritim berkaitan dengan laut atau berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Namun, secara sederhana, negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh laut atau perairan yang luas. Sebagai salah satu negara maritim yang besar, Indonesia dapat meningkatkan potensinya dalam bidang kemaritiman. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia. Sehingga banyak kapal dari berbagai negara sering melewati perairan Indonesia, bahkan singgah di Indonesia. Hal inilah yang dapat menjadi faktor pendukung perekonomian negara dengan mengembangkan sektor maritim melalui visi Indonesia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, yaitu menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.

Gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh, yaitu Presiden Joko Widodo dalam program *nawacita* bidang kemaritiman, merupakan salah satu program yang diusung Presiden Joko Widodo yang memiliki tujuan untuk mengembangkan sektor maritim. Dalam pidato pelantikannya pada tahun 2014 beliau mengatakan, yaitu: *“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk”*. Melalui gagasan tersebut, Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo berupaya untuk meningkatkan potensi dari sektor maritimnya demi meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kepentingan nasionalnya (Notohamijoyo, 2019). Dalam visi atau gagasan Poros Maritim Dunia, terdapat beberapa pilar-pilar yang menopang gagasan tersebut, pilar-pilar tersebut, yaitu: Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan, Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, Budaya Bahari, dan Diplomasi Maritim (Yanwar, 2021).

Kemudian pada level internasional, gagasan Poros Maritim Dunia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat beliau menyampaikan pidatonya di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) ke-9 pada 13 November 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Melalui penyampaian konsep gagasan Poros Maritim Dunia di forum internasional, menurut Kementerian Luar Negeri dalam laporan kinerjanya, Indonesia menegaskan posisinya siap untuk membuka kerja sama di bidang maritim dengan beberapa negara untuk mendukung kemajuan perekonomian (Fikry Cassidy, 2016). Kebijakan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan gagasan Poros Maritim dunia ini juga dapat disebut sebagai sebuah perkembangan baru dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Sejauh ini, sektor kemaritiman Indonesia belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri dan

pembangunan nasional sejauh ini lebih banyak berfokus pada daratan (Rijal N. K., 2018).

Namun, untuk mengembangkan potensi maritim Indonesia, terdapat beberapa kendala dalam prosesnya seperti akses jalan menuju pelabuhan, kapal yang tidak memadai, sistem pengelolaan maritim yang kurang optimal, dan kurangnya biaya operasional untuk mengembangkan potensi maritim itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan keinginan Indonesia mungkin hanya menjadi mimpi saja. Karena kurang optimalnya dalam berbagai aspek pembangunan maritim, maka akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan, Joko Widodo juga menjadikan gagasan poros maritim sebagai arah kebijakan luar negerinya dengan menjalin kerja sama maritim dengan negara-negara lain seperti Amerika, Belanda, India, dan Tiongkok agar dapat tercapainya visi poros maritim dunia. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengembangkan potensi maritim dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain akan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tiongkok yang juga memiliki visi *Belt Road Initiative* dan juga merupakan negara yang ekonominya bergantung pada perdagangan melalui laut dimana 85% perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Oleh karena itu, penting bagi Tiongkok untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menjaga kepentingan vital Tiongkok dalam melakukan perdagangan internasional melalui laut, termasuk Indonesia (Amalia, 2018). Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam membangun visi poros maritim dunia antara lain, yaitu; kerja sama militer, kerja sama dalam industri pertahanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama dibidang pendidikan (Agustino, 2016).

Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama dengan banyak negara asing, salah satunya Tiongkok yang merupakan negara tetangga. Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan kerja sama yang baik. Mereka membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Di era modern, hubungan Indonesia-Tiongkok secara resmi dimulai pada tahun 1950 pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Soekarno (Firdaus, 2020). Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok semakin erat ketika kedua pemimpin sering saling mengunjungi. Kemudian ditambah dengan bantuan Cina kepada Indonesia berupa kredit sebesar US\$50 juta pada tahun 1961 dan tambahan US\$30 juta tiga tahun kemudian. Hubungan kedua negara tidak selalu mulus, berbagai perbedaan dan konflik juga sering terjadi di antara keduanya. Pada masa Soeharto, kerja sama kedua negara dibekukan pada tahun 1967. Diketahui bahwa Tiongkok sedang mengalami perubahan politik yang radikal, serta tuduhan Tiongkok terhadap Angkatan Darat Indonesia yang diduga mengikuti imperialisme Amerika Serikat. Ditambah dengan peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (Rachmayanti, 2014). Pada tahun 1989, di era yang sama dengan kepemimpinan Soeharto, Indonesia kembali membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan Tiongkok.

Kemudian kedua negara mulai dekat kembali ketika masih di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini ditandai dengan penandatanganan *Strategic Partnership Agreement* atau Deklarasi Kemitraan Strategis yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Hu Jintao 2005. Penandatanganan tersebut kemudian menjadi penandatanganan kedua kerja sama ekonomi dan politik yang luas, khususnya di berbagai bidang kerja sama. Kedekatan hubungan bilateral ini semakin terjalin hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan agenda membahas berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan infrastruktur (Rachmayanti, 2014). Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok tersebut merupakan bentuk diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Diplomasi Maritim

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan memiliki potensi maritim cenderung untuk mengoptimalkan potensi kemaritimannya dan juga berkeinginan untuk mengembangkan potensinya tersebut. Dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi maritimnya, Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi maritimnya, yaitu dengan cara melakukan diplomasi maritim. Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai kegiatan di wilayah laut atau perairan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang memiliki tujuan untuk mengatur tentang batas laut, kerja sama maritim, dan pertahanan maritim (Sudirman, 2016).

Dalam kaitannya dengan Indonesia, posisi geografis dan potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan pemerintahan Indonesia yang saat ini di bawah pemerintahan Joko Widodo mencoba melakukan diplomasi maritim dengan Tiongkok sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan gagasan poros maritim dunia. Konsep diplomasi maritim pada saat ini sudah berbeda dengan konsep diplomasi maritim tradisional yang lebih menggunakan *hard power*. Diplomasi maritim pada saat ini lebih menggunakan *soft power* dalam mencapai kepentingan nasional sebuah negara dan cenderung menggunakan instrumen kebijakan maritim (seperti Angkatan Laut dan Penjaga Pantai) untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (seperti langkah-langkah membangun kepercayaan), atau (2) penggunaan instrumen diplomatik tradisional (melalui diplomat) untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah maritim, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Evan A. Laksmana, 2018).

Menurut Christine Le Miere, diplomasi maritim dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kooperatif, koersif dan persuasif. Pertama, diplomasi maritim kooperatif merupakan diplomasi yang melibatkan partisipasi berbagai aktor dalam berbagai kegiatan dengan negara lain dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek maritim. Bentuk dari penerapan diplomasi maritim kooperatif yakni bantuan pendanaan, kunjungan persahabatan, dan latihan militer gabungan. Kedua, diplomasi maritim koersif merupakan diplomasi yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan negara. Bentuk dari penerapan diplomasi maritim koersif yakni blokade maritim dan ancaman melalui kekuatan angkatan laut dengan kapal perang. Ketiga, diplomasi maritim persuasif merupakan bentuk diplomasi yang dilakukan dengan meningkatkan pengakuan negara atau bagian lain dari kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara sekaligus meningkatkan citra negara di panggung internasional. Bentuk dari penerapan diplomasi maritim persuasif yakni keikutsertaan dalam festival angkatan laut dan demonstrasi kekuatan militer (Miere, 2014). Dalam merealisasikan gagasan poros maritim dunia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan *soft diplomacy* dengan jenis diplomasi maritim kooperatif. Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan Tiongkok yang juga memiliki visi dibidang kemaritiman, yaitu *one belt one road* dan bekerja sama antar negara untuk mencapai kepentingannya dibidang kemaritiman. Konsep diplomasi maritim dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara Indonesia mewujudkan gagasan poros maritim dunia dengan melakukan kerja sama dengan Tiongkok, sehingga nantinya konsep ini dapat menjawab permasalahan yang diusung peneliti dalam konteks poros maritim dunia.

D. Argumentasi

Dengan menggunakan konsep diplomasi maritim menurut Christine Le Miere, penelitian ini mengambil pandangan bahwa melalui konsep diplomasi maritim, implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok untuk mewujudkan gagasan poros maritim harus dikembangkan melalui diplomasi maritim kooperatif untuk mencapai negara yang diakui sebagai poros maritim

dunia. Melalui gagasan poros maritim dunia yang memiliki kesamaan dengan gagasan Tiongkok, yaitu *Belt Road Initiative*, dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi maritimnya dengan Tiongkok melalui diplomasi dan kerja sama bilateral dalam mengimplementasikan gagasan poros maritim dunia. Dengan bantuan pendanaan serta kerja sama seperti sosial budaya maritim dan keamanan maritim yang ditawarkan oleh Tiongkok untuk mengimplementasikan gagasan poros maritim di Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menjadikan Tiongkok sebagai mitra utama untuk bekerja sama dalam upaya mewujudkan gagasan poros maritim dunia.

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan upaya Indonesia dalam kerja samanya dengan Tiongkok di bidang maritim untuk memenuhi tujuan kepentingan nasionalnya, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui kerja sama bilateral di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 -2019.
2. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Penulis memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, web, majalah, artikel, berita atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pembahasan dan analisis akan didasarkan pada kumpulan fakta yang kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Literatur yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas. Penulis memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, web, jurnal, artikel, berita atau peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pembahasan dan analisa akan berdasarkan kumpulan fakta yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan menggunakan konsep yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penulisan ini, penulis akan membatasi topik pada upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama internasionalnya untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia melalui kerja sama bilateral dengan Tiongkok dengan batasan konsep diplomasi maritim. Penelitian ini akan membatasi secara waktu, yaitu selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo ditahun 2014-2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan |
| BAB II | Berisi tentang posisi bidang maritim dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo serta memaparkan Sejarah hubungan Indonesia dengan Tiongkok hingga ke era Presiden Joko Widodo |
| BAB III | Revitalisasi Indonesia sebagai negara maritim melalui Poros Maritim Dunia melalui kerja sama dengan Tiongkok melalui |

berbagai implementasi pembangunan infrastruktur di sektor maritim

BAB IV Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya